



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CATUR ARIYANTO WIDODO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
3. NHK : 119337

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.854.850.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 296.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/92 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 427.200.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.131.450.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 637.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FAZZIO (BEJ AT) Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOTOR, YAMAHA BOJ-A M/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 164.600.700

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.326.301.211

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.982.751.911

III. HUTANG

Rp. 213.294.333

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.769.457.578

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.